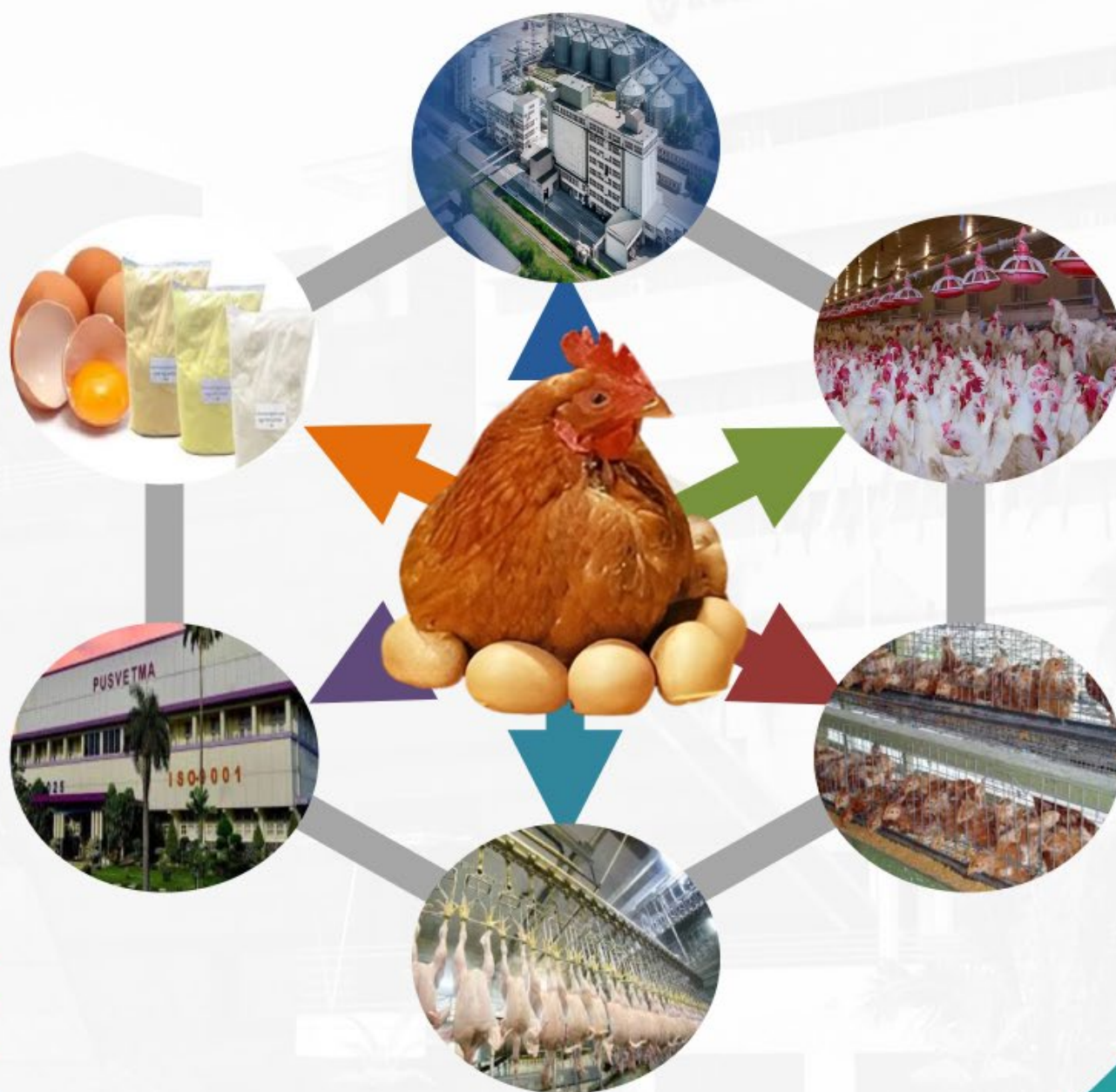




KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PENGEMBANGAN HILIRISASI AYAM TERINTEGRASI



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku “Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi” ini dapat disusun sebagai bahan sosialisasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan kemandirian protein hewani diseluruh pulau di Nusantara.

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, Kementerian Pertanian bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain PT Berdikari, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara (Holding) untuk aktif dalam pembangunan ekosistem perunggasan nasional yang lebih baik. BUMN didukung suntikan investasi dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengembangkan infrastruktur dari hulu sampai hilir, meliputi pembibitan, produksi pakan berbasis bahan baku dalam negeri, rumah potong unggas, unit pengolahan hasil peternakan, hingga sistem logistik dan pemasaran serta fasilitasi budidaya oleh peternak melalui skema kemitraan.

Kehadiran BUMN sebagai representasi dari negara diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas ayam pedaging dan ayam petelur, pengembangan infrastruktur hulu hingga hilir, serta penyediaan rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan sebagai bagian dari kerangka besar pembangunan sektor pertanian, khususnya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Pembangunan industri ayam terintegrasi juga diharapkan memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian nasional melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, dan optimalisasi pemanfaatan komoditas dalam negeri seperti jagung dan bungkil sawit sebagai bahan baku pakan. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung pencapaian target produksi daging ayam dan telur nasional, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai arah kebijakan, strategi implementasi, dan peran para pemangku kepentingan dalam program pengembangan ayam terintegrasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab membangun sektor pertanian dan subsektor peternakan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.



Jakarta, November 2025

Direktur Jenderal,

Dr. drh. Agung Suganda, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3 Landasan Hukum.....	7
1.4 Pengertian.....	7
BAB II KONDISI SAAT INI	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN	11
BAB IV DESAIN PROGRAM.....	13
4.1 Desain Program.....	13
4.2 Peran Pelaku dalam Hilirisasi Ayam Terintegrasi.....	15
4.3 Strategi Pengembangan Program	19
4.4 Lokasi Pengembangan.....	21
4.5 Pendanaan.....	22
BAB V SASARAN PROGRAM HILIRISASI AYAM TERINTEGRASI	23
5.1 <i>Output</i>	23
5.2 <i>Outcome</i>	24
BAB VI PENUTUP.....	27
LAMPIRAN.....	28
Kriteria Teknis Pembangunan Pabrik Pakan	28
Denah Pabrik Pakan.....	29
Kriteria Teknis Pembangunan Kandang GPS dan PS	30
Denah Kandang GPS dan PS	31
Kriteria Teknis Pembangunan <i>Hatchery</i>	32
Kriteria Teknis Pembangunan Kandang Pembesaran (Pullet) dan FS	32
Spesifikasi dan Denah Rumah Potong Hewan Unggas.....	34
Spesifikasi dan Denah Pengolahan Daging Ayam.....	35
Denah Ruang Produksi Pengolahan Tepung Telur	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Peternakan dan Keswan...	12
Gambar 2. Desain dan Ekosistem Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi.....	13
Gambar 3. Output Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi	23
Gambar 4. Sebaran Eksisting Dan Rencana Tambahan Unit Hilirisasi Ayam Terintegrasi Berdasarkan Pulau	24
Gambar 5. Outcome Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi	24
Gambar 6. Proyeksi Peningkatan Produksi Daging Ayam dan Telur dari Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi.....	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perunggsan yang mencakup produksi ayam pedaging, ayam petelur, pakan ternak, obat dan vitamin, hingga distribusi produk olahan, merupakan penyumbang utama dalam Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) subsektor peternakan. Dalam beberapa tahun terakhir, subsektor peternakan menyumbang sekitar 1,5–2% terhadap total PDB nasional, dan industri perunggsan menjadi kontributor terbesar dalam subsektor diperkirakan menyumbang lebih dari 50-60% dari PDB sub sektor peternakan. Industri perunggsan juga memiliki dampak terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 10% di seluruh rantai pasok, mulai dari peternak kecil, perusahaan integrator, hingga sektor distribusi dan ritel.

Selain penyumbang PDB dan tenaga kerja, produk daging ayam dan telur merupakan sumber protein yang lebih murah dan terjangkau dengan tingkat partisipasi konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan daging sapi atau ikan, untuk mendukung program Prioritas Nasional makan bergizi (MBG) dan penanganan *stunting*/gizi buruk di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau yang sebagian besar ada di Wilayah Indonesia Timur.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan preferensi Masyarakat, dan intervensi program pemerintah (MBG dan *Stunting*), diperkirakan permintaan terhadap daging ayam dan telur sangat berpotensi mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan.

Proyeksi kebutuhan protein hewani nasional tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan tingginya permintaan terhadap komoditas perunggsan. Untuk mencukupi konsumsi dalam negeri, kebutuhan daging ayam diperkirakan mencapai 4 juta ton, sedangkan kebutuhan telur nasional diproyeksikan lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 6,36 juta ton.

Perhitungan tersebut baru mencakup kebutuhan konsumsi reguler masyarakat. Selain itu, terdapat tambahan kebutuhan untuk mendukung program khusus MBG, yang dihitung secara terpisah. Program ini memerlukan suplai tambahan sebesar 774 ribu ton telur per tahun dan sekitar 1,1 juta ton daging ayam per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan di atas, penyediaan daging dan telur nasional, hampir 63% dipenuhi dari Pulau Jawa. Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai sentra utama dengan tingginya jumlah usaha perunggsan, ketersediaan sarana produksi, serta kedekatan dengan pusat konsumsi. Di luar Jawa, provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan juga berperan sebagai penopang produksi, terutama untuk memenuhi kebutuhan regional masing-masing.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap produksi di Pulau Jawa masih sangat tinggi dan berpotensi akan menimbulkan gejolak inflasi, baik untuk daging ayam maupun telur ayam. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pemerataan produksi melalui pengembangan sentra baru di luar Jawa, peningkatan akses logistik, serta penguatan kapasitas peternak untuk mendukung stabilitas pasokan dan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, peningkatan kapasitas produksi, efisiensi rantai pasok, dan penguatan dukungan kebijakan menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung visi besar Presiden untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dengan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan menuju bangsa yang berdaulat dan sejahtera, Pemerintah akan mengembangkan Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi di beberapa wilayah Indonesia.

Program ini merupakan sinergi antara Kementan, BUMN, Pemda, dan pelaku usaha. Sinergi tersebut diharapkan mampu pemeratakan produksi, meningkatkan konsumsi protein, meningkatkan kesejahteraan peternak, menggerakkan ekosistem ekonomi di setiap wilayah, menciptakan lapangan kerja, menekan angka inflasi, sekaligus mendukung kebutuhan MBG yang menyasar kelompok rentan dan generasi muda Indonesia untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia Emas 2045.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Program Pengembangan Ayam Terintegrasi merupakan stimulus ekonomi di sektor peternakan yang dimaksudkan untuk mempercepat swasembada protein di seluruh wilayah atau pulau di Indonesia, yang secara langsung akan membantu menurunkan disparitas harga. Selain itu, untuk mendorong pihak swasta, baik yang sudah eksis maupun pendatang baru, untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan subsektor peternakan. Keterlibatan ini akan mengarah pada terciptanya industri peternakan yang terintegrasi secara horizontal di setiap wilayah. Secara keseluruhan, pendekatan program ini berfokus pada desentralisasi industri peternakan ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga tidak terpusat di satu wilayah saja dan menciptakan pemerataan ekonomi.

b. Tujuan

Program ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas ayam pedaging dan ayam petelur melalui integrasi sistem budidaya, pembibitan, pakan, kesehatan hewan, dan pengolahan hasil.
2. Mewujudkan kemandirian protein hewani nasional, khususnya dalam penyediaan daging ayam dan telur, serta mengurangi ketergantungan pada pasokan impor.

3. Mengembangkan klaster perunggasan terintegrasi di berbagai wilayah sebagai basis industri yang efisien, modern, dan mampu mendukung pemerataan suplai pangan antarpulau.
4. Mengoptimalkan penggunaan bahan baku pakan dalam negeri, seperti jagung, bungkil sawit, dan komoditas lokal lainnya, guna memperkuat ketahanan industri pakan nasional.
5. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya bagi peternak rakyat, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai nilai perunggasan.
6. Meningkatkan peran strategis BUMN dalam menjaga keseimbangan usaha, stabilitas harga, serta ketersediaan produk ayam melalui penguatan fungsi *off-taker* dan *integrator*.
7. Memperkuat infrastruktur hilirisasi, termasuk rumah potong hewan unggas (RPHU), unit pengolahan hasil, fasilitas *cold chain*, dan logistik untuk meningkatkan mutu, daya saing, serta nilai tambah produk ayam dan telur.
8. Mendukung keberhasilan program prioritas nasional, khususnya penyediaan pangan bergizi melalui Program Makan Bergizi dan Susu Gratis (MBG) serta agenda besar kemandirian pangan dalam Asta Cita pemerintah.
9. Menciptakan tata niaga yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan melalui penataan rantai pasok dan penguatan peran pemerintah dalam regulasi, pengawasan, dan fasilitasi usaha.
10. Meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global melalui pengembangan produk olahan unggas bernilai tambah dan peningkatan kapasitas ekspor.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum Program Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi antara lain:

1. UU Nomor 18 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang **Pemberdayaan Peternak**
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029

1.4 Pengertian

1. Ayam Ras Pedaging (Broiler): Galur ayam hasil persilangan antar ras yang memiliki produktivitas tinggi khusus untuk menghasilkan daging
2. Ayam Ras Petelur (Layer): Galur ayam hasil persilangan antar ras yang memiliki produktivitas tinggi khusus untuk menghasilkan telur
3. Hilirisasi Ayam Terintegrasi: Sistem pengembangan industri perunggasan yang menghubungkan seluruh rantai nilai mulai dari hulu (pembibitan, pakan, kesehatan hewan) hingga hilir (pengolahan hasil, logistik, dan pemasaran) dalam satu ekosistem yang terpadu dan terkoordinasi.

4. Integrasi Vertikal: Penyatuan tahapan produksi dari hulu ke hilir di bawah satu sistem manajemen untuk meningkatkan efisiensi, pengendalian pasokan, dan kualitas produk.
5. Integrasi Horizontal: Penyatuan dan penguatan unit-unit usaha yang memiliki fungsi serupa atau saling mendukung dalam satu wilayah untuk menciptakan efisiensi skala dan pemerataan produksi.
6. BUMN Pangan: Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pangan dan ditugaskan untuk menjalankan fungsi produksi, pengelolaan, pengolahan, serta penyerapan hasil peternak dalam ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi.
7. Holdingisasi: Proses penggabungan atau penyatuan berbagai unit usaha di bawah satu entitas holding untuk memperkuat koordinasi, efisiensi, dan kendali operasional.
8. *Joint Venture* (JV): Kerja sama antara dua atau lebih badan usaha yang membentuk entitas baru untuk menjalankan bisnis tertentu dalam ekosistem perunggasan.
9. *Joint Operation* (JO): Kerja sama operasional antar badan usaha tanpa membentuk entitas baru untuk mencapai tujuan usaha dalam rantai pasok perunggasan.
10. Danantara/ BPI DANANTARA: Lembaga pengelola dana investasi pemerintah yang memberikan fasilitasi pendanaan untuk percepatan investasi di berbagai sektor strategis termasuk perunggasan.
11. Program Makan Bergizi (MBG): Program pemerintah dalam meningkatkan asupan protein hewani bagi kelompok rentan dan generasi muda melalui penyediaan daging ayam dan telur sebagai upaya peningkatan kualitas gizi nasional.
12. *Grand Parent Stock* (GPS): Tingkat pembibitan ayam yang menghasilkan *Parent Stock* melalui proses pemuliaan dan pembiakan tingkat awal.
13. *Parent Stock* (PS): Ayam indukan yang menghasilkan *Final Stock* (FS) untuk budidaya komersial ayam pedaging maupun petelur.
14. *Final Stock* (FS) / DOC FS: Bibit ayam (*Day Old Chick*) hasil produksi dari *Parent Stock* yang digunakan untuk budidaya komersial broiler ataupun layer.
15. Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU): Fasilitas pemotongan unggas yang memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan kesejahteraan hewan untuk menghasilkan daging ayam yang higienis dan aman konsumsi.
16. *Cold Storage*: Fasilitas penyimpanan berpendingin yang digunakan untuk menjaga kualitas produk unggas hasil panen dan olahan dalam rantai dingin (*cold chain*).
17. *Offtaker*: Pihak yang berperan sebagai pembeli utama hasil produksi peternak, dalam hal ini BUMN Pangan, untuk menjamin serapan pasar.
18. Kredit Usaha Rakyat (KUR): Skema pembiayaan pemerintah dengan bunga rendah untuk mendukung pengembangan UMKM, termasuk peternak dalam ekosistem hilirisasi ayam.

19. Kredit Usaha Peternakan Ayam (KUP): Skema pembiayaan khusus peternakan ayam dengan bunga flat 3% per tahun guna meningkatkan kapasitas usaha peternak rakyat.
20. KOPDES Merah Putih: Koperasi desa yang berperan sebagai wadah organisasi peternak dan UMKM dalam mendukung pelaksanaan budidaya dan akses pembiayaan.
21. Kemandirian Protein Hewani: Kondisi ketika kebutuhan daging ayam dan telur nasional dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri tanpa ketergantungan impor.
22. Ketahanan Pangan: Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara cukup, merata, aman, bergizi, dan berkelanjutan.
23. Rantai Pasok Perunggasan: Keseluruhan proses produksi dan distribusi yang mencakup pembibitan, pakan, kesehatan hewan, budidaya, pengolahan, penyimpanan, logistik, hingga pemasaran produk unggas.
24. UMKM Peternakan: Usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjalankan budidaya ayam pedaging atau petelur dengan skala terbatas namun berperan penting dalam rantai nilai perunggasan.
25. Klaster Perunggasan: Kawasan terintegrasi yang mengelompokkan unit-unit usaha perunggasan (pembibitan, pakan, budidaya, pengolahan) dalam satu wilayah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.

BAB II KONDISI SAAT INI

Sektor perunggasan Indonesia saat ini berada dalam posisi swasembada dan memiliki ketahanan yang relatif kuat. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi nasional daging ayam ras pada tahun 2023 mencapai 3,72 juta ton. Dengan estimasi kebutuhan konsumsi sekitar 3,51 juta ton (dihitung dari selisih produksi dan surplus), Indonesia mencatat surplus daging ayam sekitar 210 ribu ton. Pada komoditas telur, produksi nasional tahun 2023 mencapai 6,1 juta ton, sementara konsumsi nasional berada pada kisaran 5,88 juta ton, menghasilkan surplus sekitar 220 ribu ton.

Paradoksnya, posisi swasembada yang solid ini berada dalam kondisi rentan menghadapi lonjakan permintaan (*demand shock*) baru yang masif akibat implementasi penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan kebutuhan tambahan tahunan untuk mendukung program ini mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur. Untuk daging ayam, kebutuhan tambahan sebesar 1,1 juta ton akan menyerap hampir seluruh surplus nasional yang tersedia saat ini. Kondisi ini berpotensi membawa neraca pasokan nasional ke titik impas, sehingga tidak tersisa ruang bagi pertumbuhan konsumsi reguler, fluktuasi produksi musiman, maupun upaya menjaga stabilitas harga. Sementara itu, kebutuhan tambahan telur sebesar 774 ribu ton jauh melampaui surplus *baseline* yang hanya sekitar 107,4 ribu ton. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan defisit nasional baru sekitar 593 ribu ton per tahun. Jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat, kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga pangan, mengganggu ketahanan pangan nasional, dan bahkan mengancam keberlanjutan Program MBG itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk mengamankan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) MBG dan peningkatan konsumsi protein hewani sekaligus menjaga stabilitas harga dan konsumsi publik, diperlukan intervensi kebijakan yang mampu mempercepat peningkatan kapasitas produksi secara signifikan. Target nasional ditetapkan untuk menambah produksi sebesar 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur ayam di atas *baseline* produksi yang sudah ada.

BAB III ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan nasional, seperti yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan lewat hilirisasi, serta pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, didukung reformasi birokrasi, pengembangan infrastruktur, dan ekonomi hijau, menuju visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah tersebut merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Salah satu asta cita yang secara mandatory merupakan perang penting Kementerian Pertanian adalah asta cita nomor 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain swasembada pangan, Kementan juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi dalam hal penyediaan pangan daging, telur, dan susu Nasional.

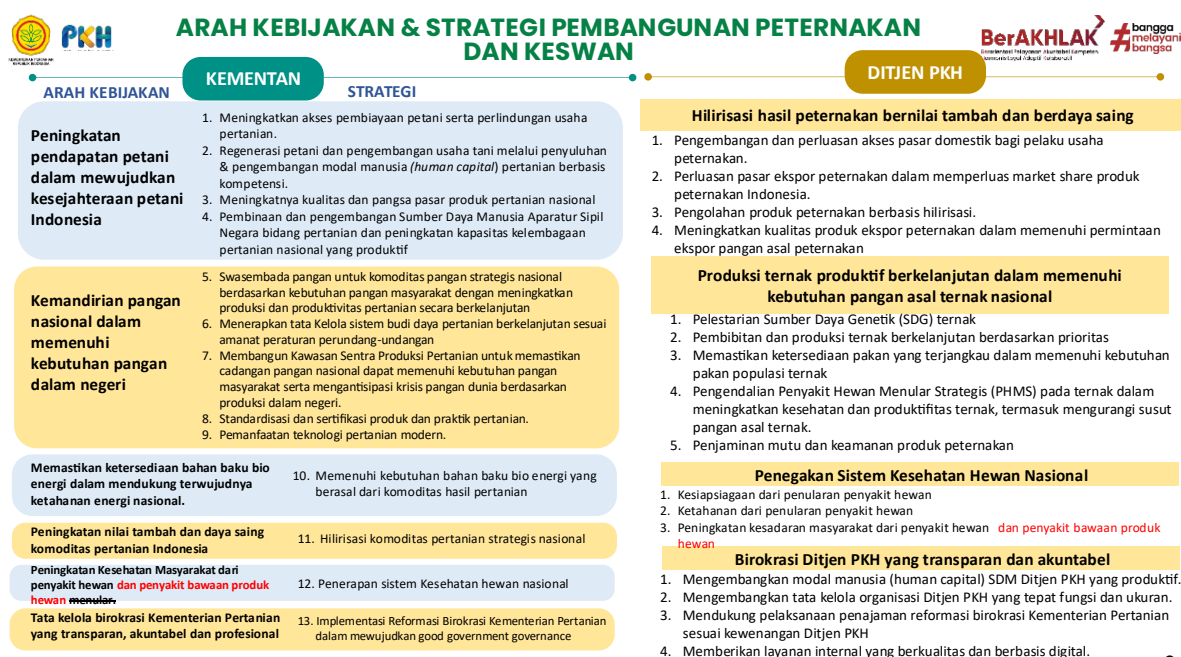
Selaras dengan kebijakan Nasional, arah kebijakan Pembangunan peternakan dan Kesehatan hewan periode 2025–2029 akan berfokus pada **peningkatan ketersediaan pangan hewani** sebagai bagian dari agenda besar ketahanan pangan nasional. RPJMN menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan strategis, termasuk **daging, telur, dan susu**, guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat nilai tambah subsektor peternakan.

Dalam mendukung sasaran tersebut, Ditjen PKH menetapkan arah kebijakan **hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing**, yang bertujuan memperluas akses pasar domestik dan ekspor. Strategi ini memperkuat tujuan RPJMN untuk mendorong industrialisasi pangan, termasuk pengolahan komoditas peternakan yang mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing produk daging, telur, dan susu. Dengan pengembangan rantai nilai yang terintegrasi dari hulu ke hilir, produksi nasional tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga kualitas dan keamanan pangan.

Selanjutnya, arah kebijakan **produksi ternak produktif berkelanjutan** menjadi instrumen utama dalam mencapai target peningkatan produksi daging, telur, dan susu yang telah ditetapkan RPJMN. Upaya peningkatan kapasitas pembibitan nasional, pelestarian sumber daya genetik ternak, penyediaan pakan yang terjangkau dan berkualitas, serta perbaikan manajemen budidaya menjadi faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas. Kebijakan ini sejalan dengan fokus RPJMN pada transformasi sistem pangan, termasuk peningkatan efisiensi produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan protein hewani nasional.

Ditjen PKH juga memperkuat **peningkatan sistem kesehatan hewan nasional**, terutama dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). RPJMN 2025–2029 menempatkan penguatan sistem ketahanan kesehatan hewan sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan dan kesehatan nasional. Dengan memperkuat surveilans, vaksinasi, biosekuriti, dan kesadaran Masyarakat. Ditjen PKH memastikan populasi ternak tetap sehat dan produktif, sehingga peningkatan produksi daging, telur, dan susu dapat dicapai secara konsisten tanpa gangguan wabah.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Ditjen PKH dalam periode RPJMN 2025–2029 berorientasi pada peningkatan produksi **daging, telur, dan susu** melalui hilirisasi, penguatan produktivitas, keamanan hayati, serta tata kelola birokrasi yang responsif. Dengan kerangka kebijakan ini, Ditjen PKH berperan sentral dalam mewujudkan ketersediaan pangan hewani yang cukup, aman, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.



Gambar 1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

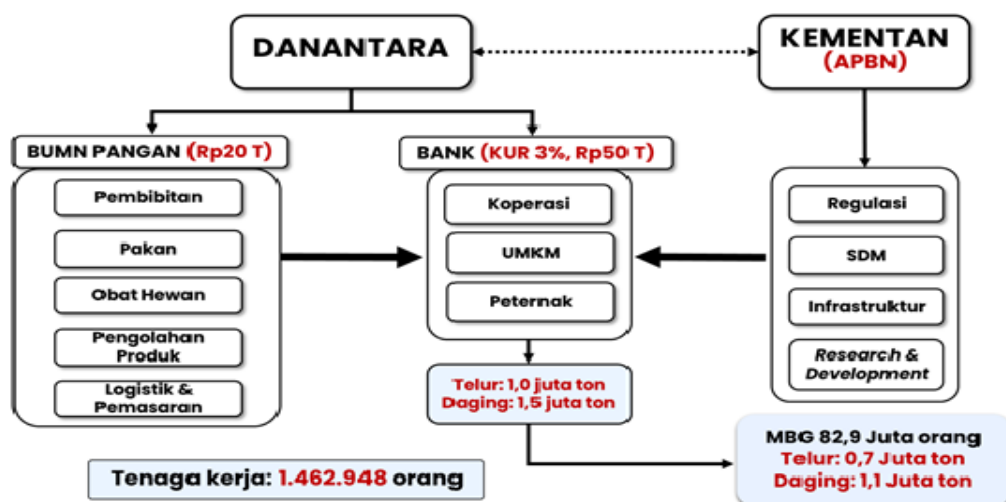
BAB IV DESAIN PROGRAM

4.1 Desain Program

Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi dirancang sebagai sebuah kerangka pembangunan komprehensif yang menghubungkan seluruh rantai nilai perunggasan dari hulu hingga hilir. Program ini akan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi Desa Merah Putih (peternak rakyat), sebagai representasi dari negara melalui pembentukan ekosistem baru dalam industri perunggasan yang baik dalam meningkatkan aksesibilitas sarana produksi, penyediaan produksi daging dan telur, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan efisiensi produksi baik untuk memenuhi kebutuhan regular dan Makan Bergizi (MBG).

Program ini dibangun melalui pendekatan integrasi vertikal dan horizontal untuk memastikan bahwa seluruh simpul produksi, distribusi, dan pengolahan berada dalam satu kesatuan ekosistem yang efisien, terukur, dan mampu menghasilkan output yang berkelanjutan. Program ini juga mengharuskan adanya integrasi peran dari BUMN (penyedia bibit, penyedia pakan, pengolahan hasil, penyedia obat vaksin), Koperasi Desa Merah Putih/Peternak Rakyat (budidaya), dan Perbankan (penyedia KUR) menjadi satu kesatuan pelaksana industri perunggasan ayam petelur dan pedaging.

Melalui pendekatan di atas, program ini diharapkan akan mampu menjawab tantangan besar dalam industri perunggasan nasional, mulai dari ketergantungan bahan baku impor, fluktuasi harga, ketidakseimbangan pasokan, hingga kualitas infrastruktur yang belum merata, sekaligus menjawab isu inflasi produk ayam yang sering terjadi dalam beberapa dekade sebelumnya.



Gambar 2. Desain dan Ekosistem Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi

Skema pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi peternakan ayam salah satu tujuan utamanya adalah untuk kemandirian protein hewani di setiap pulau/wilayah dan mendukung penyediaan kebutuhan daging ayam dan telur pada program MBG melalui sinergi antara Danantara, Kementerian Pertanian, lembaga perbankan, BUMN, dan para pelaku usaha.

Danantara diharapkan dapat memberikan dukungan alokasi anggaran investasi setidaknya sebesar Rp 20 triliun untuk memperkuat seluruh rantai pasok mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, obat hewan, pengolahan produk, hingga logistik, dan pemasaran. Program hilirisasi mengoptimalkan fasilitas Danantara dalam mempercepat investasi untuk pertumbuhan perekonomian nasional agar tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga dari dana korporasi. Fasilitas dari Danantara diharapkan juga dapat menarik investasi baru, membangun sinergi antar BUMN, dan menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif.

Produk dan layanan yang dihasilkan dari investasi tersebut mencakup seluruh rantai pasok peternakan ayam, mulai dari penyediaan bibit ayam (pembibitan) untuk ayam pedaging dan petelur, BUMN Pangan memastikan ketersediaan DOC yang berkualitas bagi peternak. Selanjutnya, BUMN Pangan memproduksi pakan ternak sebagai komponen utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha budidaya. Untuk menjaga kesehatan ternak, BUMN Pangan juga menyediakan obat hewan dan vaksin yang diperlukan dalam mencegah penyakit serta meningkatkan performa ayam. Di tahap hilir, BUMN Pangan mengembangkan produk olahan ayam, baik daging maupun telur beserta turunannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Selain itu, BUMN Pangan mengelola logistik dan pemasaran untuk memastikan produk-produk tersebut tersalurkan secara merata dan efisien ke koperasi, UMKM, peternak, hingga pasar konsumen.

Dengan cakupan yang komprehensif ini, investasi hulu dan hilir melalui pengalokasian fasilitas pendanaan kepada BUMN untuk membangun infrastruktur RPHU & *Cold Storage* (hilir) dan GPS/PS/Pakan (hulu) di luar Jawa menjadi pilar utama yang secara langsung memitigasi risiko logistik dan memastikan stabilitas pasokan serta kualitas produk unggas nasional. Selanjutnya dengan penguatan rantai pasok melalui holdingisasi bertujuan mengontrol operasional secara terpusat, memastikan rantai pasok dari bibit hingga pengolahan berjalan efisien dan dapat mengalirkan surplus daging ayam dan telur ke wilayah yang defisit.

Selanjutnya secara paralel kemandirian lokal terus diperkuat secara bertahap. Rencana penambahan unit di setiap pulau (terutama di Sumatera, Sulawesi, dan Papua) secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi lokal, mengurangi ketergantungan pada Jawa, dan secara bertahap menutup defisit regional.

Skema terintegrasi dan penguatan kemandirian lokal ini secara eksplisit mengalokasikan dan menjamin pasokan untuk program MBG, yang merupakan bagian esensial dari upaya ketersediaan protein hewani. Data neraca Telur dan

Daging Ayam menunjukkan alokasi porsi yang jelas untuk kebutuhan MBG, bahkan di wilayah Indonesia Timur (misalnya Papua Pegunungan) di mana Kebutuhan Daging MBG mencapai 97,40% dan Kebutuhan Telur MBG mencapai 62,81% dari total kebutuhan. Persentase yang tinggi ini menunjukkan bahwa pentingnya skema dengan menggunakan infrastruktur BUMN untuk menjamin akses protein bagi kelompok sasaran di wilayah yang sulit dijangkau pasar reguler.

4.2 Peran Pelaku dalam Hilirisasi Ayam Terintegrasi

a. Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sesuai tugas dan fungsinya diharapkan Danantara akan menyiapkan dana Investasi sebesar Rp 20 triliun untuk mendukung kebutuhan investasi Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi yang akan dilaksanakan oleh BUMN.

b. BUMN

BUMN bertugas mengelola *holding services management* (layanan manajemen *holding*). BUMN akan bekerja sama dengan anak perusahaan atau mitra usaha yang berfokus pada unit bisnis spesifik, mulai dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk ekosistem terintegrasi secara horizontal, memastikan bahwa setiap tahapan dalam rantai nilai (misalnya, pakan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran) terhubung dan beroperasi di bawah koordinasi yang efisien.

Peran BUMN Pangan yang signifikan dan berdampak dalam penyediaan komoditas pangan esensial: Menjadi *leading sector* dengan mengintegrasikan rantai pasok dari Hulu ke Hilir, meliputi Pembibitan, Pakan, Obat Hewan, Pengolahan Produk, hingga Logistik & Pemasaran. BUMN hadir mengurangi dominasi pasar dan meningkatkan peran negara dalam industri peternakan.

c. Perbankan

Pada pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi ini, perbankan turut mengambil peran penting melalui penyiapan pembiayaan KUR dengan bunga 3% untuk lebih kurang 100.000 debitur dengan plafon maksimal Rp.500 juta, sehingga bank pelaksana setidaknya perlu menyediakan dana sebesar Rp.50 triliun. KUR untuk diakses oleh peternak anggota koperasi, UMKM, dan peternak sebagai pelaksana budidaya di lapangan. Suku bunga 3% diperlukan untuk meringankan beban peternak pada fase awal.

Secara spesifik peran inti perbankan adalah menyediakan akses permodalan untuk mendukung tercapainya tujuan usaha. Untuk itu beberapa peran penting perbankan antara lain:

- **Penyediaan Kredit Sesuai Kebutuhan:** Bank harus memastikan ketersediaan dan penyaluran kredit (seperti Kredit Usaha Rakyat/KUR atau skema khusus) kepada sasaran yang tepat (Peternak perorangan skala mikro/kecil, Poktan, Gapoktan, dan Koperasi Peternak). Hal ini secara langsung mendukung tujuan Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dan Mendukung program hilirisasi industri.
- **Mitigasi Risiko:** Bank perlu merancang skema kredit yang mempertimbangkan risiko spesifik sektor peternakan (misalnya, pola pengembalian yang disesuaikan dengan siklus panen/produksi) agar *Non-Performing Loan* (NPL) tetap terjaga, sehingga keberlanjutan program kredit terjamin.
- **Memfasilitasi Modernisasi:** Pemberian kredit harus mampu membiayai adopsi teknologi dan penerapan manajemen peternakan yang baik, bukan hanya modal kerja.

Untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan mencapai tujuan usaha, perbankan berperan sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam hal pelaksanaan program hilirisasi ini termasuk bekerjasama dengan pemerintah. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan antara lain:

- **Edukasi dan Sosialisasi:** Melakukan sosialisasi yang masif tentang skema kredit, prosedur pengajuan, dan manfaatnya kepada kelompok sasaran, terutama peternak skala mikro dan kecil yang mungkin memiliki keterbatasan informasi.
- **Pendampingan Usaha:** Bekerja sama dengan dinas teknis atau pihak lain (misalnya perusahaan inti) untuk memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan pendampingan dalam pengelolaan usaha peternakan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan Mendorong modernisasi dan Meningkatkan daya saing dan skala usaha peternak rakyat.
- **Membentuk Kelembagaan:** Mendukung upaya menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi peternak di tingkat koperasi melalui layanan perbankan yang terintegrasi untuk koperasi.

Lebih jauh lagi, perbankan diharapkan juga mampu berperan sebagai penghubung keuangan dalam ekosistem industri:

- **Memfasilitasi Kemitraan:** Mendorong dan memfasilitasi hubungan kemitraan antara peternak UMKM dengan perusahaan inti atau rantai pasok yang lebih besar (misalnya melalui skema *executing* atau

channeling) untuk memastikan peternak mampu berpartisipasi secara adil dalam rantai pasok nasional dan memenuhi kebutuhan program MBG.

- Integrasi Keuangan: Menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi bagi peternak, Poktan, dan Gapoktan, yang mendukung efisiensi transaksi di sepanjang rantai nilai.

Dengan menjalankan peran ini, perbankan tidak hanya bertindak sebagai penyalur uang, tetapi juga sebagai katalis yang mendorong pemerataan pertumbuhan usaha peternakan ayam dan peningkatan kapabilitas peternak sesuai dengan tujuan program dan skema kredit program yang diberikan.

d. Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi sebuah kelembagaan yang dipandang paling tepat untuk mereprestasikan semangat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Selain itu, dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Merujuk kepada Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. (sumber: <https://merahputih.kop.id/>).

Secara spesifik KDMP menjadi saluran bagi BUMN Pangan untuk menyalurkan dukungan dan bermitra dengan UMKM Peternak. KDMP bertanggung jawab dalam mengorganisir dan memberdayakan para peternak kecil dan menengah di tingkat desa/kelurahan. Secara teknis, KDMP menjadi fasilitator rantai pasok hulu. Meskipun pasokan bahan baku (seperti *Grand Parent Stock (GPS)*, *Parent Stock (PS)*, *Final Stock (FS)*, Pakan, dan Obat Hewan) secara langsung berasal dari BUMN Pangan ke UMKM Peternak, KOPDES berperan dalam memastikan penyaluran dan distribusi input produksi tersebut kepada anggotanya (UMKM Peternak) berjalan lancar dan tepat sasaran. KDMP bertindak sebagai organisasi kolektif yang mengintegrasikan UMKM Peternak ke dalam rantai pasok yang difasilitasi oleh BUMN Pangan, sehingga peternak dapat fokus pada produksi (Ayam Pedaging dan Ayam Petelur).

Peran KDMP sangat penting karena bertugas menciptakan efisiensi, koperasi menyederhanakan proses bagi BUMN Pangan yang hanya perlu berinteraksi dengan satu entitas (Koperasi) daripada ribuan peternak individu. Selain itu KDMP memastikan pemberdayaan Peternak berjalan. Peternak kecil yang bergabung dalam Koperasi mendapatkan akses yang lebih baik ke modal,

pakan berkualitas, bibit, dan teknologi yang mungkin sulit dijangkau secara individu. Hal ini juga berlaku dalam hal akses pembiayaan melalui skema kredit program sehingga lebih efisiensi dalam pelaksanaan fasilitasi maupun pendampingan. KDMP yang memiliki ekuitas mumpuni bahkan bisa menjadi avalis bagi anggotanya sehingga peternak kecil anggota lebih mampu untuk mengakses pembiayaan kredit program.

e. Peran Peternak Rakyat

Dalam skema pengembangan ini, Peternak, yang dikategorikan sebagai UMKM, memainkan peran sentral sebagai pelaksana utama budidaya dan penghubung antara sektor hulu dan hilir. Peran mereka diawali dengan mendapatkan dukungan komprehensif dari BUMN Pangan yang bertindak sebagai *supplier* dan *offtaker*. BUMN Pangan menyediakan seluruh kebutuhan input hulu peternak, mencakup bibit mulai dari *Grand Parent Stock* (GPS), *Parent Stock* (PS), *Final Stock* (FS), Pakan, dan Obat Hewan. Selain itu, peternak juga didukung oleh KOPDES Merah Putih dalam hal organisasi dan fasilitasi.

Dengan dukungan *input* tersebut, peternak menjalankan budidaya ayam. Peternak Ayam Pedaging ditargetkan memproduksi 1,2 Miliar Ekor, yang kemudian menghasilkan Produksi Daging Ayam sebesar 1,5 juta ton. Sementara itu, Peternak Ayam Petelur ditargetkan memproduksi 55 juta ekor, yang menghasilkan Produksi Telur sebesar 1 juta ton. Hasil produksi daging dan telur ini kemudian disalurkan kembali kepada BUMN Pangan, yang berperan ganda sebagai *Offtaker*. BUMN Pangan lalu memproses hasil panen melalui RPHU & Pengolahan Daging dan *Cold Storage*, Logistik & Pemasaran sebelum mendistribusikannya ke Masyarakat Berpenghasilan Ganda (MBG). Kontribusi seluruh kegiatan yang melibatkan Peternak ini diperkirakan menciptakan lapangan Tenaga Kerja sebesar 1.462.948 orang.

f. Peran Pemerintah

Di saat yang sama, Kementan memperkuat aspek regulasi, kualitas SDM, infrastruktur, serta dukungan riset untuk memastikan bahwa hasil produksi memiliki standar keamanan dan nilai gizi yang tinggi. Integrasi ini menghasilkan pasokan telur dan daging ayam dalam jumlah besar dan harga yang lebih terjangkau, sehingga kebutuhan gizi protein hewani bagi masyarakat terutama 82,9 juta penerima manfaat MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Melalui hilirisasi yang menyeluruh, program ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendongkrak kesejahteraan peternak dan menciptakan jutaan lapangan kerja, menjadikannya penopang penting dalam percepatan perbaikan gizi nasional.

Integrasi Peternak Rakyat melalui Kemitraan antara BUMN, Koperasi, dan Peternak (UMKM) yang difasilitasi akses KUR, tidak hanya meningkatkan produksi (target 1,5 Juta Ton Daging dan 1 Juta Ton Telur) tetapi juga

menjamin bahwa produk hasil peternak rakyat tersebut memiliki *offtaker* pasti (BUMN Pangan) yang akan mengolah dan mendistribusikannya, termasuk untuk program MBG yang setidaknya membutuhkan penyediaan daging ayam sebanyak 1,1 juta ton dan telur sebanyak 0,7 juta ton.

Dengan demikian, hilirisasi terintegrasi berfungsi sebagai kerangka kerja menyeluruh yang mengatasi defisit regional melalui pembangunan infrastruktur dan menjamin distribusi yang adil, baik untuk kebutuhan pasar reguler maupun untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui program MBG.

4.3 Strategi Pengembangan Program

Strategi kunci untuk pengembangan ekosistem ini menitikberatkan pada empat pilar utama yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang terpusat dan terintegrasi secara horizontal, sebagai berikut:

a. Pembentukan Struktur Badan Usaha Terintegrasi.

Struktur organisasi badan usaha terintegrasi melalui sistem holdingisasi untuk mencapai kontrol operasional yang terpusat. Unit-unit usaha yang berbeda dapat dikoordinasikan di bawah satu manajemen pusat, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, sinergi antar unit meningkat, dan efisiensi operasional dapat dioptimalkan.

b. Penggabungan Badan Usaha Melalui Kemitraan.

Penggabungan badan usaha Koperasi, Korporasi, maupun UMKM ke dalam kerangka kerja yang terpadu diwujudkan melalui kerjasama kemitraan dalam bentuk *Joint Venture* (JV), di mana entitas baru dibentuk dengan kepemilikan bersama, atau *Joint Operational* (JO), di mana operasional dilaksanakan bersama tanpa membentuk entitas baru. Tujuan dari penggabungan ini adalah memberdayakan dan mengintegrasikan semua pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, ke dalam rantai nilai yang sama.

c. Membentuk BUMN sebagai Superholding dan Pengelola Layanan

BUMN bertugas mengelola *holding services management* (layanan manajemen *holding*). BUMN akan bekerja sama dengan anak perusahaan atau mitra usaha yang berfokus pada unit bisnis spesifik, mulai dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk ekosistem terintegrasi secara horizontal, memastikan bahwa setiap tahapan dalam rantai nilai (misalnya, pakan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran) terhubung dan beroperasi di bawah koordinasi yang efisien.

d. Sinergi Pendanaan/Investasi Hulu dan Hilir.

Strategi kunci yang terakhir berkaitan dengan alokasi sumber daya finansial, yaitu bahwa anggaran yang dikelola oleh BUMN akan digunakan untuk investasi hulu dan hilir. Investasi hulu mencakup pembangunan fasilitas seperti

pabrik pakan dan *breeding farm* (GPS/PS), sedangkan investasi hilir mencakup pembangunan fasilitas pengolahan seperti RPHU dan *cold storage*. Penggunaan anggaran ini secara strategis bertujuan untuk membangun dan memperkuat infrastruktur fisik di seluruh rantai pasok agar ekosistem terintegrasi dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara umum, skema hilirisasi ayam terintegrasi dirancang untuk memperkuat ketersediaan pangan khususnya penyediaan protein hewani sekaligus mendukung program Makan Bergizi (MBG). Melalui sinergi antara Danantara, Kementerian Pertanian, BUMN Pangan, perbankan, serta koperasi, UMKM, dan peternak, seluruh rantai produksi ayam mulai dari pembibitan, pakan, obat hewan, hingga pengolahan, logistik, dan pemasaran ditata menjadi satu sistem yang efisien dan terkontrol. BUMN Pangan menyediakan fondasi produksi yang kuat melalui investasi besar pada hulu dan pengolahan, sementara pembiayaan KUR dari perbankan memungkinkan koperasi dan peternak kecil meningkatkan skala usaha dan produktivitas.

e. Mendorong Skema Kredit Program untuk Usaha Peternakan Ayam

Program Kredit Usaha Peternakan Ayam (KUPA) merupakan intervensi pemerintah dalam bentuk penyediaan skema pembiayaan yang dirancang khusus untuk mengatasi *market failure* dan *financial gap* yang dialami peternak ayam UMK. Program Kredit Usaha Peternakan Ayam diperuntukkan bagi pelaku usaha UMK peternakan ayam pedaging dan petelur yang berkomitmen mendukung program percepatan peningkatan produksi nasional dan pengamanan pasokan Program MBG. Skema Kredit Usaha Peternakan Ayam ini dirancang untuk dapat diakses melalui lembaga perbankan penyalur, dengan dukungan subsidi bunga dan penjaminan dari pemerintah.

KUPA secara khusus dirancang untuk peternakan ayam dengan memberikan suku bunga flat 3% per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan KUR Eksisting yang menerapkan suku bunga berjenjang antara 6%, 7%, 8%, atau 9% per tahun. Dari segi Plafon, KUPA menawarkan cakupan yang lebih luas dan spesifik untuk usaha peternakan, mulai dari Mikro & Kecil (Rp 0 s/d Rp 500 juta) hingga Menengah (di atas Rp 500 juta s/d Rp 5 Miliar), sementara KUR Eksisting memiliki segmentasi Super Mikro, Mikro, dan Kecil dengan batas maksimal Rp 500 juta.

Kedua jenis kredit ini sama-sama dapat digunakan untuk Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK), namun Jangka Waktu KUP lebih fleksibel, yakni Maksimal 7 Tahun, dibandingkan KUR yang memiliki jangka waktu bervariasi antara 3 hingga 5 tahun. KUP juga memberikan Grace Period yang jelas (3 bulan untuk Ayam Pedaging dan 6 bulan untuk Ayam Petelur), berbeda dengan KUR yang bergantung pada analisis Bank.

Baik KUR maupun KUPA untuk agunan menggunakan Obyek yang dibiayai sebagai Agunan Pokok; namun, untuk Agunan Tambahan, KUPA lebih

memudahkan dengan ketentuan bahwa pinjaman di bawah Rp 500 juta tanpa agunan dapat menggunakan Avalis sebagai syarat penyalur.

Sebagai upaya memitigasi risiko bagi lembaga keuangan penyalur, implementasi Kredit Usaha Peternakan Ayam harus mencakup Lembaga Penjamin Kredit. Bank/Lembaga pembiayaan penyalur akan didampingi oleh lembaga penjamin kredit yang ditunjuk pemerintah. Selain itu pelaku usaha harus menyusun rencana kebutuhan kredit sebagai dasar perencanaan penggunaan kredit sekaligus meyakinkan perbankan bahwa pinjaman yang diberikan akan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya serta memudahkan perbankan dalam melaksanakan pendampingan.

Operasional KUPA terdapat dua proses bisnis yang berbeda yaitu proses bisnis ayam petelur dan ayam pedaging. Debitur Kredit Usaha Peternakan Ayam Petelur akan menggunakan dana untuk pengadaan pullet (ayam remaja siap bertelur) atau pemeliharaan DOC. Usaha ayam pedaging berfokus pada pembelian input produksi (DOC, Pakan, OVK) untuk satu siklus produksi yang sangat pendek, yakni sekitar 30-40 hari.

Kedua proses bisnis tersebut dapat melalui skema Kredit Investasi (KI) untuk kandang/peralatan, dan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk biaya produksi dan operasional. Untuk usaha ayam petelur diusulkan *grace period* (masa tenggang pembayaran angsuran pokok) selama 6 bulan. Justifikasinya adalah: Masa tenggang ini secara presisi diasumsikan jika usaha peternakan ayam petelur dimulai dari pembelian pullet, dan tidak mencakup 6 bulan (24 minggu) masa *rearing* (pembesaran). Masa tenggang ini mencakup waktu perluasan dan penyesuaian kandang selama tiga bulan, masa transisi ternak ayam ke masa bertelur selama satu bulan, stabilisasi produksi selama satu bulan, dan stabilisasi pendapatan dan pemasaran telur selama satu bulan.

Usaha ayam pedaging diusulkan *grace period* (masa tenggang pembayaran angsuran pokok) selama 3 bulan. Justifikasinya adalah: Bulan 1-2 (hari 30-45): perluasan dan penyesuaian kandang. Bulan 2-3 (Hari 45-85): Satu siklus produksi. Bulan 3 (Hari 85-100): Pembayaran satu siklus produksi diterima. Masa tenggang 3 bulan memungkinkan peternak menyelesaikan satu siklus panen penuh dan menerima pembayarannya, sehingga memiliki arus kas yang stabil dan kuat sebelum angsuran pokok pertama jatuh tempo. Ini memberikan stabilitas krusial di awal usaha.

4.4 Lokasi Pengembangan

Kriteria lokasi pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi diantaranya mempertimbangkan: (i) defisit produksi telur dan daging; (ii) ketersediaan lahan; (iii) sebaran MBG; (iv) ketersediaan infrastruktur industri existing; (v) informasi pendukung lainnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, program hilirisasi ayam terintergrasi akan dikembangkan secara bertahap di sebagian besar propinsi Indonesia, yaitu Propinsi: Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Papua Selatan, Jawa Timur, Jambi, Bengkulu, Kep Bangka Belitung, Kep Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Pegunungan

4.5 Pendanaan

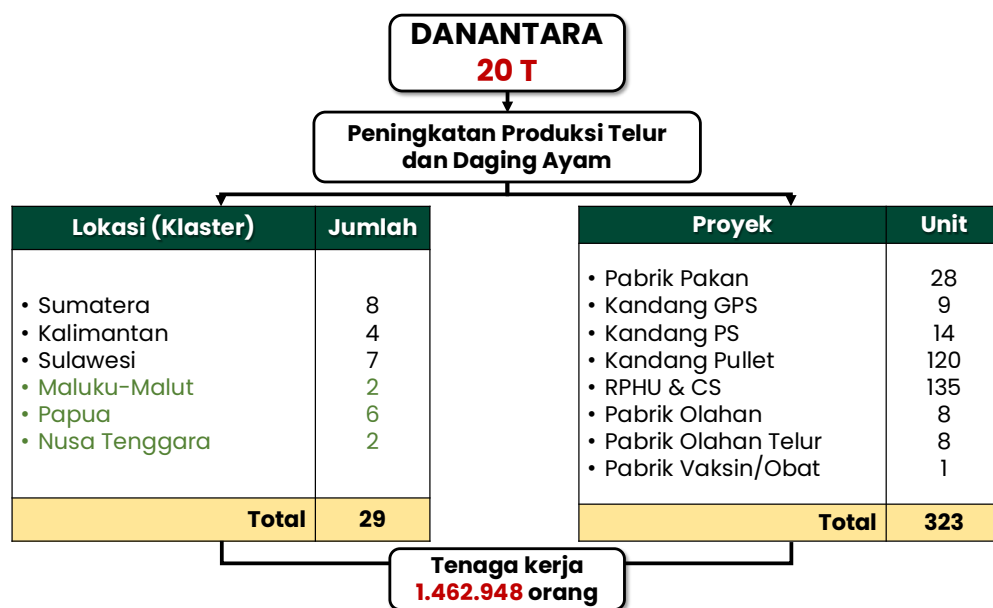
- a. Pendanaan Investasi sebesar Rp 20 Triliun dari BPI DANANTARA yang ditujukan untuk BUMN Pangan guna menjalankan operasional dan infrastruktur inti.
- b. Pendanaan Kredit Program sebesar Rp 50 Triliun, memanfaatkan skema pinjaman perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3% yang ditujukan kepada Koperasi, UMKM, dan/atau Peternak.
- c. APBN: Dukungan pemerintah dari aspek regulasi, pengembangan SDM, penyediaan infrastruktur, serta *Research & Development*

BAB V

SASARAN PROGRAM HILIRISASI AYAM TERINTEGRASI

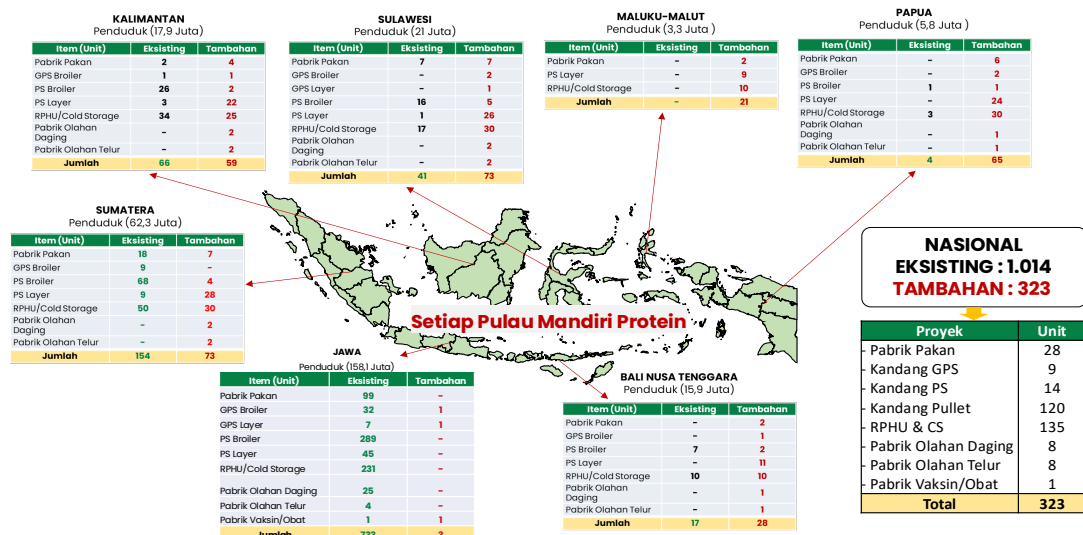
5.1 Output

Program pengembangan hilirisasi industri ayam terintegrasi ini direncanakan untuk menghasilkan output berupa penambahan kapasitas dan pemerataan infrastruktur industri ayam secara nasional. Penambahan fasilitas akan didistribusikan ke luar Jawa, terutama di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, Papua, dan Bali-Nusa Tenggara, dengan tujuan mencapai prinsip "Setiap Pulau Mandiri Protein".



Gambar 3. Output Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi

Berdasarkan Gambar 2, secara Nasional, target output program hilirisasi ayam terintegrasi adalah penambahan total 323 unit fasilitas industri, yang mencakup 28 unit Pabrik Pakan, 9 unit Kandang *Grand Parent Stock* (GPS), 14 unit Kandang *Parent Stock* (PS), 120 unit Kandang Pullet, 135 unit Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU)/*Cold Storage*, 8 unit Pabrik Olahan Daging, 8 unit Pabrik Olahan Telur, serta 1 unit Pabrik Vaksin/Obat. Penambahan ini tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, namun juga didistribusikan secara strategis ke seluruh pulau di Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Malut, Papua, dan Bali-Nusa Tenggara, sehingga menghasilkan sebaran fasilitas yang lebih merata untuk mendukung produksi di masing-masing wilayah. Sebaran penambahan unit setiap pulau sebagaimana disajikan pada Gambar 3.



Gambar 4. Sebaran Eksisting Dan Rencana Tambahan Unit Hilirisasi Ayam Terintegrasi Berdasarkan Pulau

5.2 Outcome

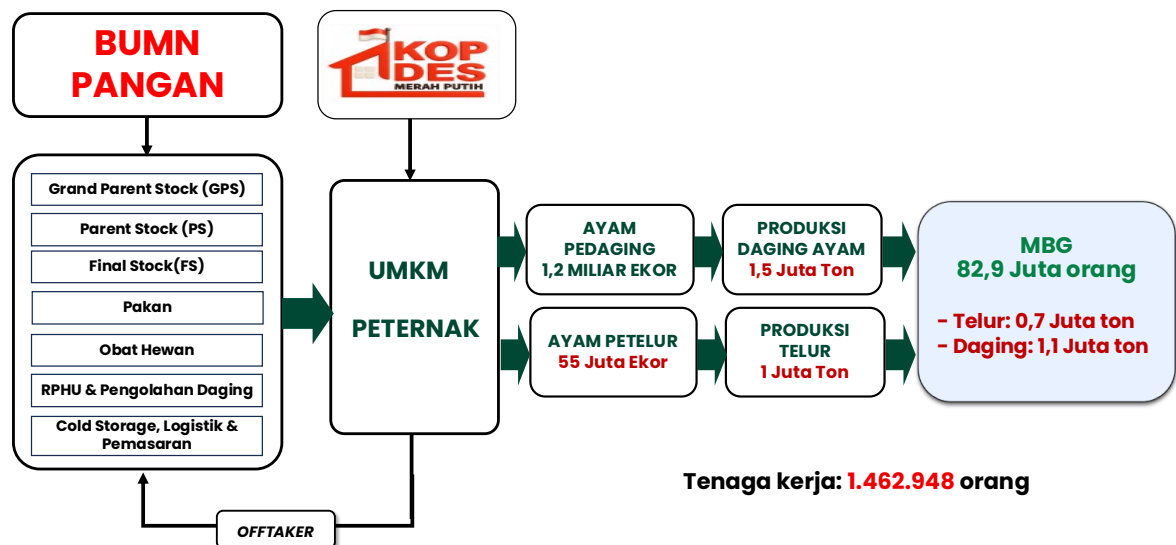
Implikasi strategis dari program ini diharapkan akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi nasional, kesiapan industri perunggasan, serta stabilitas rantai pasok dan harga. Dengan demikian, maka mulai dari perencanaan produksi dan dukungan kebijakan dari pengelolaan pakan, kesehatan hewan, hingga sistem logistik, dan pasar disusun secara komprehensif agar tambahan kebutuhan dari program MBG dapat dipenuhi tanpa mengganggu ketersediaan daging ayam bagi konsumsi umum masyarakat. Program ini diharapkan akan dapat menjadi landasan penting bagi semua stakeholder dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan hewani dan strategi penguatan industri unggas nasional.



Gambar 5. Outcome Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi

Adapun outcome jangka panjang yang diharapkan dari program ini adalah:

- Serapan tenaga kerja. Dengan adanya modernisasi usaha peternakan ayam akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja terampil di pedesaan, sehingga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan urbanisasi. Penguatan kelembagaan koperasi juga akan meningkatkan modal sosial dan ketahanan kolektif peternak dalam menghadapi fluktuasi pasar, sehingga dengan adanya desentralisasi industri ayam terintegrasi ini diharapkan dapat memicu penciptaan lapangan kerja baru, sehingga akan ada penyerapan tenaga kerja yang masif, yaitu sebanyak 1.462.948 orang.
- Peningkatan produksi. Dengan adanya program ini diharapkan produksi telur akan mencapai 1,0 juta ton dan daging ayam sebesar 1,5 juta ton yang ditujukan untuk pasar umum. Selain itu juga meningkatkan produksi telur untuk dapat memenuhi kebutuhan sebanyak 0,7 Juta ton dan daging ayam sebanyak 1,1 Juta ton untuk mendukung Program MBG sebanyak 82,9 Juta orang.



Gambar 6. Proyeksi Peningkatan Produksi Daging Ayam dan Telur dari Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi

- Peningkatan pendapatan peternak. Dengan adanya keterlibatan peternak dan UMKM dalam pelaksanaan budidaya ayam petelur dan pedaging, maka akan berdampak dalam peningkatan pendapatan peternak. Pemberian akses kredit khusus kepada peternak dan UMKM akan dapat mendorong peternak untuk meningkatkan skala usaha mereka, sehingga akan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan secara masif.
- Pertumbuhan PDRB dan PDB. Dengan program ini akan menciptakan permintaan baru terhadap industri pendukung: material konstruksi, peralatan kandang modern (kipas, cooling pad, nipel), penyedia jasa instalasi, dan teknisi. Selanjutnya, operasional kandang akan meningkatkan permintaan input produksi (pakan, DOC, OVK), dan jasa logistik. Dengan adanya penguatan industri hulu-hilir yang

mendesentralisasi klaster tiap pulau dan provinsi, maka sub sektor peternakan diproyeksikan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur dan luar Jawa yang akan berdampak terhadap pertumbuhan PRDB, yang pada akhirnya juga akan berdampak terhadap peningkatan PDB nasional. Subsektor peternakan memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*) yang kuat, sehingga setiap investasi di sektor ini akan menghasilkan pengganda output yang tinggi bagi ekonomi nasional.

- e. Pemerataan dan Peningkatan Konsumsi (kg/kapita/tahun). Secara ekonomi, terwujudnya integrasi vertikal dan horizontal di setiap pulau dari hulu (pakan dan pembibitan) hingga hilir (pemotongan dan pengolahan) akan memendekkan rantai pasok (*supply chain*) menjadi lebih pendek dan efisien. Hal tersebut secara signifikan akan menurunkan disparitas harga produk peternakan di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses telur dan daging ayam dengan harga yang terjangkau yang akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi masyarakat di semua wilayah, di wilayah timur dan luar Jawa. Selain itu, BUMN juga akan memiliki kekuatan pasar yang cukup untuk melakukan intervensi harga saat terjadi fluktuasi yang merugikan peternak atau konsumen, serta menjamin ketersediaan pasokan telur dan daging secara nasional, terutama di daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh logistik.
- f. Penambahan Industri Hulu Hilir. Terbentuknya ekosistem industri ayam yang terintegrasi di tingkat regional, mulai dari hulu (pakan, pembibitan/GPS/PS) hingga hilir (RPHU/CS, pabrik olahan).
- g. Penambahan Laba BUMN (Net). Dengan adanya program ini akan ada peningkatan drastis dalam jumlah penyediaan telur dan daging ayam oleh BUMN yang akan menguasai hampir seperempat (24%) pasar daging dan lebih dari sepersepuluh (13%) pasar telur, sehingga BUMN akan memperoleh keuntungan dalam industri perunggasan.
- h. Swasembada Telur dan Daging Ayam di semua Provinsi. Dengan terwujudnya kemandirian protein di setiap pulau, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Jawa. Selain itu akan meningkatkan ketahanan pangan di semua provinsi karena ketersediaan pasokan protein yang lebih stabil di setiap wilayah.
- i. Mengurangi *Stunting* dan Angka Kemiskinan. Dengan adanya program ini diharapkan akan dapat membantu mengurangi *stunting* karena telur dan daging ayam dapat diakses oleh semua masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau. Sehingga kebutuhan protein hewani dari telur dan daging ayam akan mendukung untuk pertumbuhan anak dan mengurangi *stunting*. Selain itu program ini menjadi sumber pendapatan dan sekaligus mendukung program pemberdayaan ekonomi seperti beternak ayam untuk mengurangi angka kemiskinan.

BAB VI PENUTUP

Secara keseluruhan, program pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi ini bukanlah sekadar program investasi, melainkan merupakan strategi transformasi industri pangan nasional yang ambisius dan terukur. Dengan dukungan pendanaan total yang melibatkan Rp20 Triliun dari DANANTARA untuk penguatan BUMN Pangan dan potensi penyaluran KUR 3% sebesar Rp 50 Triliun bagi peternak, program ini menargetkan penciptaan ekosistem yang terpadu dan berkelanjutan.

Output kuantitatif yang jelas berupa penambahan 323 unit fasilitas industri dan pembentukan 29 klaster terintegrasi di luar Jawa menegaskan komitmen untuk mendesentralisasi industri dan mewujudkan prinsip "Setiap Pulau Mandiri Protein". Strategi ini terbukti krusial, mengingat potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah seperti Maluku dan Papua yang mencapai 7,81 persen, jauh di atas rata-rata nasional.

Proyeksi menunjukkan bahwa intervensi BUMN ini akan mematahkan dominasi pasar yang selama ini dikuasai segelintir perusahaan, dengan BUMN diproyeksikan menguasai 13% pasar telur dan 24% pasar daging, sehingga mampu menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan. Secara ekonomi, program ini dipastikan meningkatkan omzet industri dari sekitar Rp 554 Triliun menjadi sekitar Rp 653 Triliun. Pada akhirnya, sasaran utama program ini adalah dampak sosial, yaitu penciptaan lapangan kerja bagi 1.462.948 orang dan kontribusi pada 82,9 juta orang penerima manfaat program makan siang bergizi.

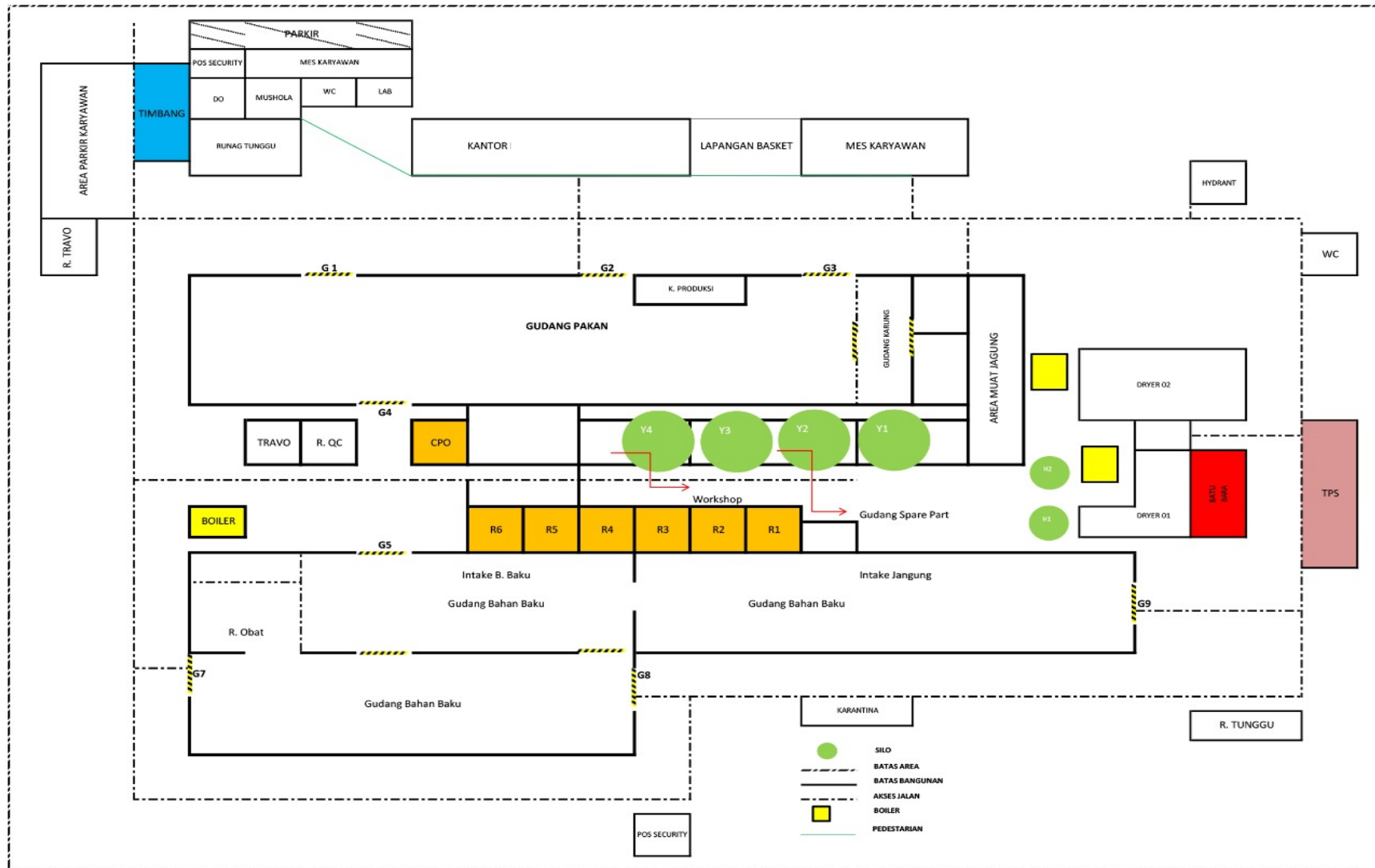
Dengan demikian, program ini menjadi pondasi strategis untuk swasembada protein yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan ekonomi, dan penguatan ketahanan pangan nasional di masa depan.

LAMPIRAN

Kriteria Teknis Pembangunan Pabrik Pakan

No	Komponen Biaya	Jumlah Fisik	Satuan	Spesifikasi	
				10.000 Ton	5.000 Ton
1	Luas Lahan	3,00	Ha		
2	Bangunan fullset			22.410	13.154
	a. Pabrik			21.760	12.504
	Bangunan Bahan Baku	1	Luas (m2)	10.800	5.400
	Bangunan Produksi	1	Luas (m2)	2.520	1.764
	Sirkulasi/Manuver	1	Luas (m2)	5.000	2.500
	Area Mesin Produksi	1	Luas (m2)	2.000	1.400
	Area Intake + Bagging	1	Luas (m2)	1.200	1.200
	Control Room	1	Luas (m2)	240	240
	b. Kantor	1	Luas (m2)	150	150
	c. Fasilitas Penunjang	1	Luas (m2)	500	500
	d. Pagar Keliling	1	m2	700	700
3	Alat dan Mesin Pengolah Pakan				
	Hammermill	1	Paket	25 ton/jam	15ton/jam
	Roller mill	1	Set	10 ton/jam	5 ton/jam
	Pelletmill set	1	Set	15-20 ton/jam	5-8 ton/jam
	Mixer Horizontal	1	Set	5 ton/batch	3 ton/batch
	Micro scale	1	Set	Micro-ingredient Manual Intake	Micro-ingredient Manual Intake
	Mixer micro Premix	1	Set	200-500 kg/batch	50-200 kg/batch
	Robotic packing	1	Set	600-1.200 bag/jam	300-600 bag/jam
	Pallet Besi	1	Set	5.600	2.800
	Genset	1	Set	1.500-2.000 kVA	800-1.000 kVA
	Bin	1	Set	20-30 bin	10-20 bin
	Hopper			2-3 unit besar	1-2 unit sedang
	Screw Conveyor			extensive kap 20 ton/jam	medium kap 10-12 ton/jam
	Instalasi, Listrik, mesin, kompresor	1	Set		
	Boiler	1	Set	2.000 kg/jam	1.000 kg/jam
	Silo dan pondasi	5	Set	2.000 ton/unit	2.000 ton/unit
	Dryer dan Silo kecil	1	Set	15-20 ton/jam	8-10 ton/jam
4	Kendaraan	10,00	Unit	1 mobil operasional, 1 mobil standby, 2 forklift, 1 loader, 5 truk ps	1 mobil operasional, 2 forklift, 1 loader, 2 truk ps

Denah Pabrik Pakan



Kriteria Teknis Pembangunan Kandang GPS dan PS

1. Prasarana Lokasi

- a. Memiliki dokumen UKL/UPL dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RUTR).
- b. Jarak minimal 500 meter dari pemukiman dan dibatasi pagar keliling setinggi ≥ 2 meter dengan pintu masuk tunggal.
- c. Jarak antar unit usaha:
 - Dengan pembibitan ayam ras lain: minimal 1.000 meter.
 - Dengan peternakan ayam/budidaya lain: minimal 1.000 meter.
 - Dengan peternakan babi: minimal 2.000 meter.
 - Dengan tempat penampungan kotoran: minimal 1.000 meter.
 - Dengan TPA: minimal 2.000 meter.
- d. Luas lahan yang dibutuhkan kapasitas 3 flock GPS
- e. GPS: Luas unit farm dan bangunan pendukung 20 Ha
- f. PS: Luas 25 Ha kapasitas 5 flock.

2. Lahan dan Akses

- a. Lahan memenuhi persyaratan teknis untuk kegiatan pembibitan.
- b. Tersedia air bersih, listrik stabil, sumber energi cadangan, dan akses jalan memadai.

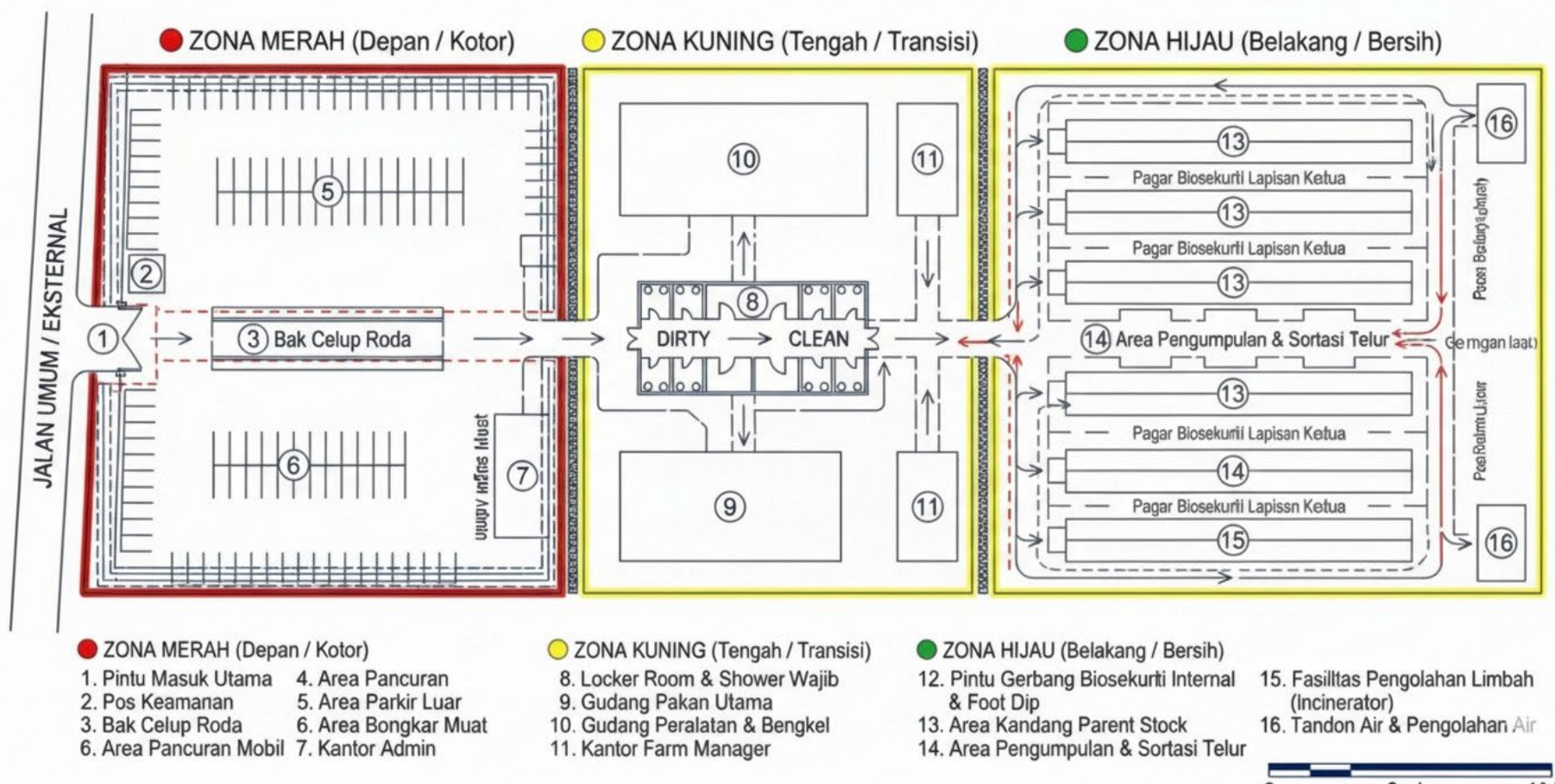
3. Bangunan

- a. Jenis Bangunan Utama:
Kandang, menara air, ruang sanitasi (terlarang & terbatas), ruang autopsi, gudang pakan dan peralatan, insinerator, unit limbah, kantor, rumah karyawan & jaga, tempat parkir, gardu listrik.
- b. Desain Bangunan:
 - Kandang dapat berupa open house atau close house, dengan kapasitas sesuai standar bibit.
 - Ventilasi cukup, bahan mudah dibersihkan, dan tata letak mencegah kontaminasi silang.
 - Arah kandang open house: memanjang Barat–Timur.
 - Lokasi pembibitan tetua dan induk harus terpisah.
 - Jarak antar kandang minimal selebar kandang.
 - Kandang dan hatchery terpisah minimal 500 meter.
 - Gudang pakan berjarak minimal 50 meter dari kandang.

4. Peralatan

- a. Dilengkapi peralatan kandang standar (tempat pakan, minum, pemanas, ventilasi, dan penerangan).
- b. Dilengkapi peralatan pendukung lainnya (sanitasi, pengukuran, keamanan biosekuriti, dan komunikasi).

Denah Kandang GPS dan PS



Kriteria Teknis Pembangunan HATCHERY

1. Persyaratan Lokasi

- a. Luas lahan yang dibutuhkan 10 Ha
- b. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTD)
- c. Tidak berada satu lokasi dengan peternakan pembibitan dan berjarak minimal 500 meter dari peternakan pembibitan
- d. Berjarak minimal 1000 meter dari lokasi peternakan lainnya
- e. Berjarak minimal 2000 meter dari tempat pembuangan akhir sampah
- f. Tidak berada di bagian kota/kab yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan serta tidak berada di daerah rawan banjir
- g. Batas lokasi harus diberi pagar keliling dengan tinggi minimal 1,75 meter dan jarak dari dinding bangunan utama penetasan minimal 10 meter

2. Lahan dan Akses

- a. Lahan memenuhi persyaratan teknis untuk kegiatan penetasan.
- b. Tersedia air bersih, listrik stabil, sumber energi cadangan, dan akses jalan memadai

3. Bangunan

- a. Jenis Bangunan Utama:
Ruang Penerimaan telur, fumigasi, penyimpanan telur (holding room), ruang eram (Setter Room), ruang penetasan (Hatcher Room), ruang kuri (pull chick room), ruang seleksi (grading room), pencucian, penyimpanan, unit limbah, kantor, rumah karyawan dan jaga, tempat parkir, gardu listrik.
- b. Desain Bangunan:
 - Sirkulasi dijaga agar tidak lembab
 - Ventilasi cukup, bahan mudah dibersihkan, dan tata letak mencegah kontaminasi silang.
 - Dinding ruang simpan telur tidak mengelupas dan berjamur serta tahan suhu dingin.
 - sudut dinding berbentuk lengkung.
 - Langit-langit ruang simpan telur mudah dibersihkan, cukup cahaya, lampu penerangan berpelindung, mempunyai ventilasi yang cukup.

4. Peralatan

- a. Dilengkapi peralatan penetasan standar (Baki telur (egg tray), Kereta telur, Meja atau mesin seleksi (egg grader) Peralatan sanitasi, Mesin eram (setter dan perlengkapannya), Egg candler, Mesin tetas (hatcher), Alat potong paruh, jengger dan vaksinasi, Kotak kemas kuri)
- b. Dilengkapi peralatan pendukung lainnya (lampu, lemari ES, kompresor, alat ukur kelembapan, dan ruang AC).

Kriteria Teknis Pembangunan Kandang Pembesaran (Pullet) dan FS

1. Prasarana Lokasi

- a. Memiliki dokumen UKL/UPL dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RUTR).
- b. letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ayam pedaging; dan.
- c. Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya, sbb:
 - Dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu masuk tunggal (oneway system)
 - Jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter
 - Bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat
- d. Luas lahan yang dibutuhkan 10 Ha

2. Lahan dan Akses

- a. Lahan memenuhi persyaratan teknis untuk kegiatan budidaya.
- b. Tersedia air bersih, listrik stabil, sumber energi cadangan, dan akses jalan memadai.

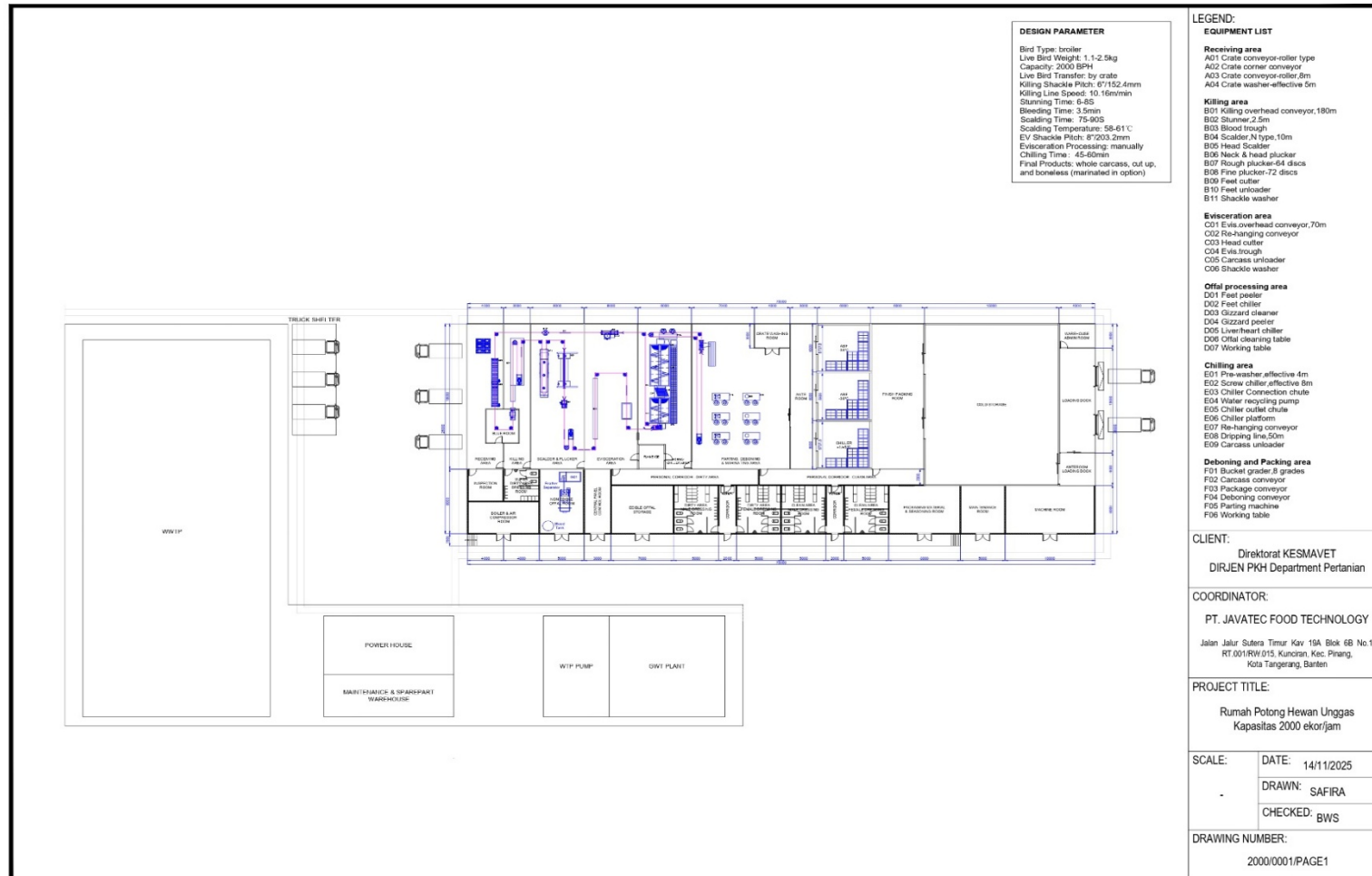
3. Bangunan

- a. Jenis Bangunan Utama:
Kandang, menara air, ruang sanitasi (terlarang & terbatas), ruang autopsi, gudang pakan dan peralatan, insinerator, unit limbah, kantor, rumah karyawan & jaga, tempat parkir, gardu listrik.
- b. Desain Bangunan:
 - Kandang dapat berupa open house atau close house, dengan kapasitas sesuai standar budidaya.
 - Ventilasi cukup, bahan mudah dibersihkan, dan tata letak mencegah kontaminasi silang.
 - Arah kandang open house: memanjang Barat–Timur.
 - Lokasi kandang anak ayam dan pembesaran.
 - Jarak antar kandang minimal selebar kandang.
 - Kandang dan hatchery terpisah minimal 500 meter.
 - Gudang pakan berjarak minimal 50 meter dari kandang

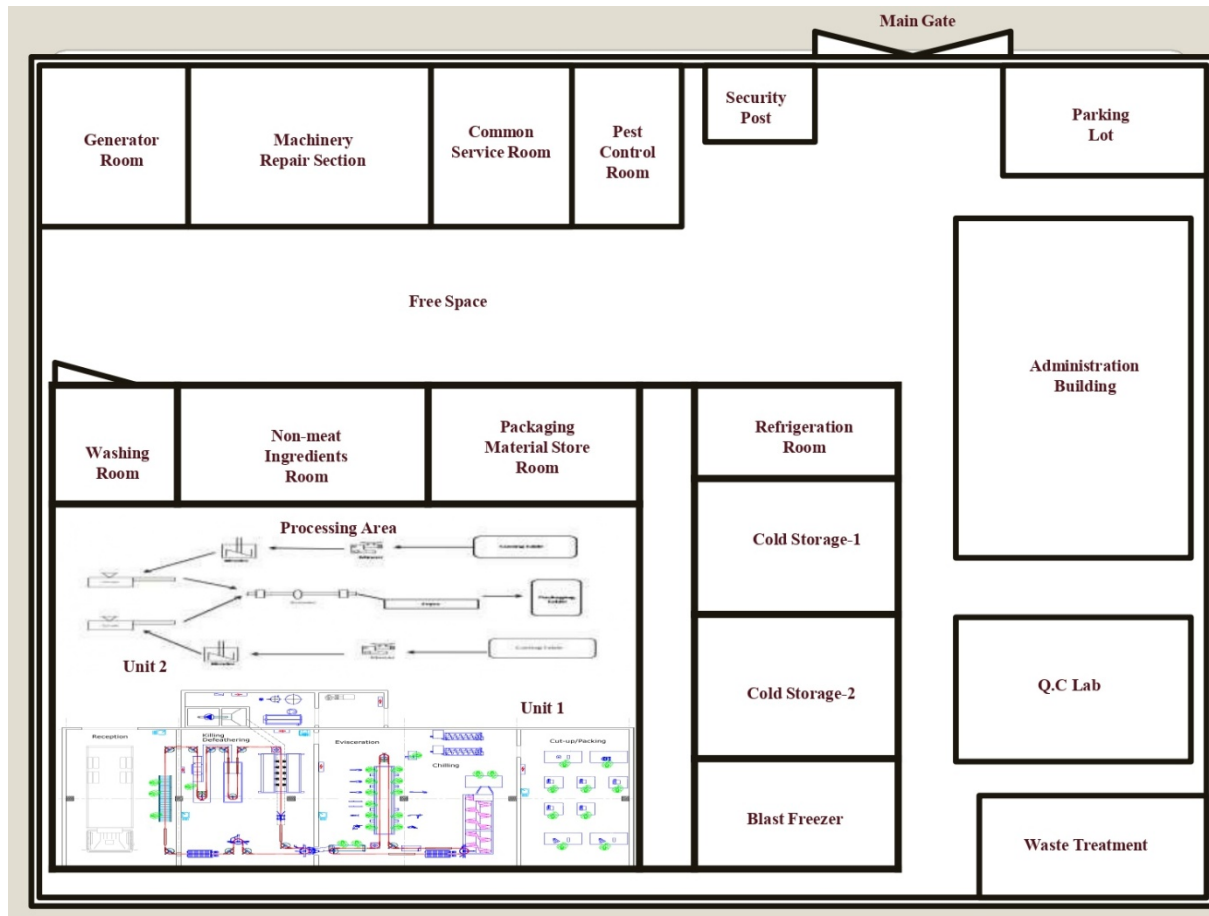
4. Peralatan

- a. Dilengkapi peralatan kandang standar (tempat pakan, minum, pemanas, ventilasi, dan penerangan).
- b. Dilengkapi peralatan pendukung lainnya (sanitasi, pengukuran, keamanan biosekuriti, dan komunikasi).

Spesifikasi dan Denah Rumah Potong Hewan Unggas



Spesifikasi dan Denah Pengolahan Daging Ayam



Specific Areas

- ❑ Administration Building
 - ❑ Quality Control Lab
 - ❑ Pest Control Room
 - ❑ Common Service Room
 - ❑ Machinery Repair Section
 - ❑ Generator Room
 - ❑ Waste Treatment
 - ❑ Main Gate
 - ❑ Security Post
 - ❑ Parking Lot
- ❑ **Processing Area**
 - ❑ Washing Room
 - ❑ Non-meat Ingredients Room
 - ❑ Packaging Material Store Room
 - ❑ **Refrigeration Room**
 - ❑ Cold Storage 1
 - ❑ Cold Storage 2
 - ❑ Blast Freezer

Equipments & Machinery

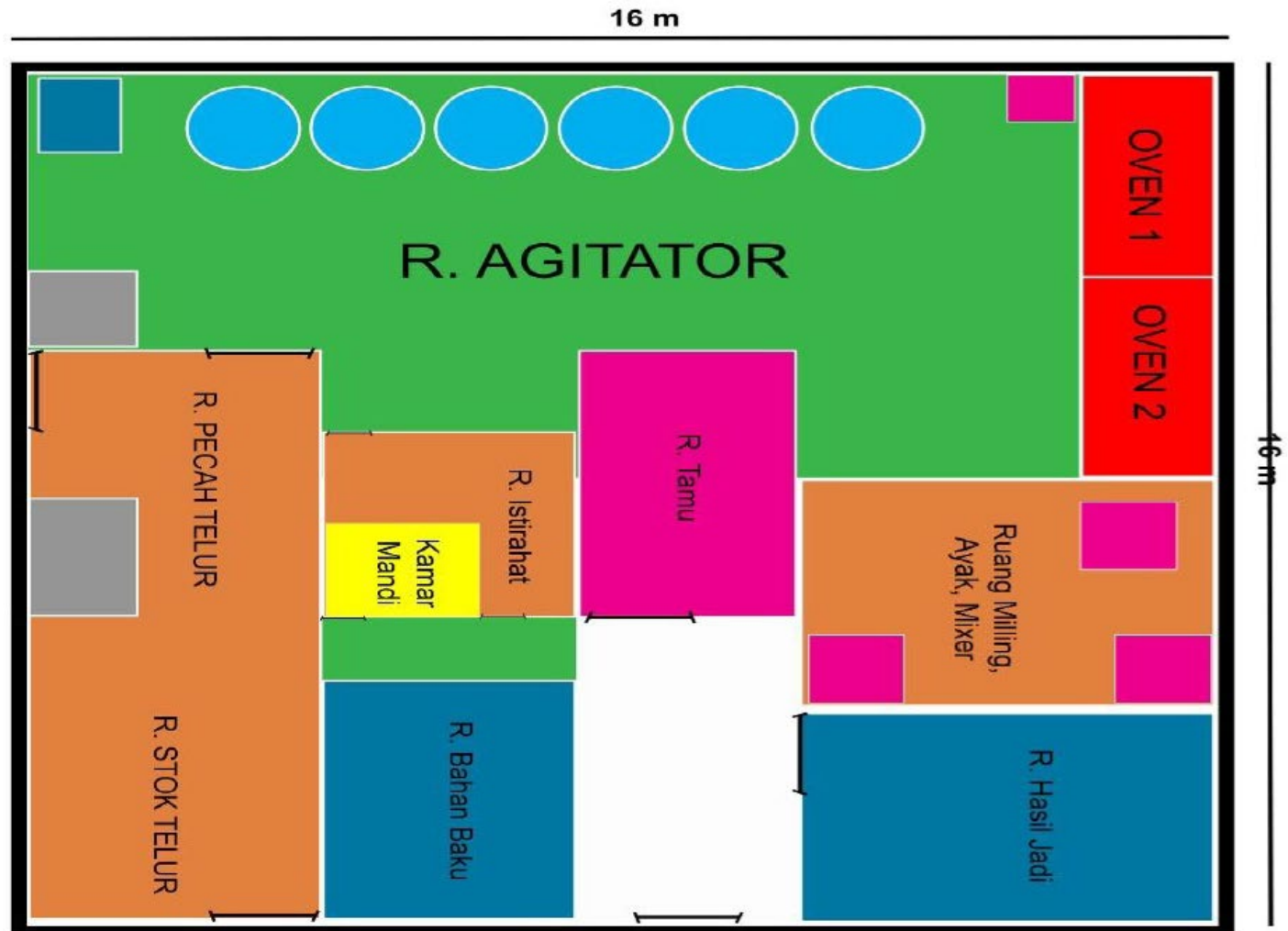
Primary Processing

- ❑ Blood Trough
- ❑ Scald Tank
- ❑ Inline Plucker
- ❑ Head Cutter
- ❑ Hock Cutter
- ❑ Evisceration Tools
- ❑ Giblet Chiller
- ❑ Screw Chiller
- ❑ Shackle Washer

Secondary Processing

- ❑ Grinder
- ❑ Mixer
- ❑ Former
- ❑ Breeder
- ❑ Fryer
- ❑ Miscellaneous

Denah Ruang Produksi Pengolahan Tepung Telur





**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jl. Harsono RM No.3 Gedung C 6-9 , Ragunan, Jakarta, 12550
<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>